

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Suatu organisasi pada umumnya memiliki kewajiban untuk menyusun dan menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas keadaan keuangan yang terjadi pada organisasi tersebut selama satu periode pelaporan. Organisasi yang menyusun laporan keuangan bukan hanya organisasi yang bergerak di sektor privat saja, organisasi yang bergerak di sektor publik juga melakukan penyusunan laporan keuangan. Suatu sistem pemerintahan juga termasuk sebagai organisasi yang bergerak di sektor publik sehingga melakukan penyusunan laporan keuangan yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan merupakan sebuah media untuk suatu entitas dalam hal ini pemerintah yang berfungsi untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat memberi kemudahan bagi publik untuk memahami apa yang terkandung di dalam laporan keuangan yang telah disusun tersebut. Laporan keuangan yang baik adalah yang terdapat unsur-unsur seperti relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah untuk memberikan laporan keuangan yang lebih akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah, akuntabilitas dan transparansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik (Badjuri dan Trihapsari, 2004). Hal tersebut dilakukan seiring dengan adanya tuntutan masyarakat yang berkeinginan agar organisasi sektor publik lebih meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.

Sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak masyarakat seperti hak ingin tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk di dengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*) maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menjadi subyek pemberi informasi yang memenuhi ketiga hak tersebut. Akuntansi pemerintahan berperan penting dalam memberikan informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial suatu pemerintah daerah untuk terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah proses pemberian informasi atas aktivitas, kegiatan, dan kinerja finansial yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk memenuhi unsur akuntabilitas tersebut, maka pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menerbitkan laporan keuangan terhadap pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban untuk menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Kemudian LKPD tersebut diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan diberitahukan untuk masyarakat umum setelah melewati proses audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Komponen yang ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Saldo Anggaran Berlebih, Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan setelah melalui proses audit yang dilakukan oleh BPK, maka akan dikeluarkan opini atau pendapat tentang laporan keuangan tersebut. Pendapat tersebut diantaranya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Mengeluarkan Pendapat (TMP).

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah antara lain penelitian Aswadi (2013) tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada pemerintah Kabupaten Pinrang). Kemudian menggunakan penelitian Nugraheni dan Subaweh (2008) tentang pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Lalu menggunakan penelitian

Widari (2017) tentang pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sebagian besar penelitian, termasuk literatur pelaporan keuangan sektor publik yang telah melakukan penelitian tentang perubahan sistem akuntansi telah mengadopsi dasar teoritis yang berbeda dengan cara pandang tertentu. Pendekatan teoritis menunjukkan bahwa tidak adanya keterbatasan teori dalam menjelaskan proses tersebut. Lebih khusus lagi, ada kesempatan untuk mengeksplorasi metode penelitian yang dapat memengaruhi dinamika proses perubahan sistem akuntansi dalam konteks tertentu. (Joanne Lye, et all, 2005)

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah yang belum pernah dilakukan penelitian dengan judul maupun variabel yang sama dengan penelitian ini. Selain itu jika kebanyakan penelitian terdahulu penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pada Kabupaten/Kota yang memperoleh opini WTP dari BPK, maka penelitian ini justru memilih Kabupaten Kendal yang berkali-kali mendapat opini WDP dari BPK.

Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester II yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa sebanyak 15 Kabupaten/Kota dari total 36 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Tengah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). BPK menambahkan paragraf penjelas terhadap LKPD dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) antara lain terkait dengan penvajian laporan keuangan yang belum

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan masalah lain yang muncul yaitu terkait dengan kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Salah satu Kabupaten yang mendapatkan opini tersebut yaitu Kabupaten Kendal. Bahkan Kabupaten Kendal telah mendapat opini WTP selama beberapa tahun berturut-turut dengan pengecualian yang hampir sama setiap tahunnya yaitu antara lain laporan barang milik daerah tidak mempunyai informasi aset tetap yang konsisten. Selain itu, tanah untuk jalan belum disajikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Permasalahan lain yaitu tanah yang digunakan untuk irigasi belum disajikan dan mutasi peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan didasarkan pada Berita Acara Serah Terima (BAST) juga tidak valid.

Hal tersebut dirasa menarik bagi peneliti untuk melihat seberapa jauh hal tersebut bisa terjadi secara berturut-turut. Peneliti berusaha untuk mengetahui bagaimana hal itu bisa terjadi beserta faktor-faktor yang memengaruhi seperti prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, penerapan SAP, dan SPI yang dijalankan sehingga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan oleh Kabupaten Kendal.

Peneliti memilih variabel akuntabilitas karena dengan prinsip akuntabilitas akan tercipta suatu pertanggungjawaban dari pemerintah yaitu berupa penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah terhadap masyarakat yang telah memberikan wewenang untuk kepentingan tersebut. Ermino (2017)

pada penelitian terdahulu menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sedangkan pemilihan variabel transparansi karena dengan prinsip transparansi akan tercipta suatu kepercayaan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai, dalam hal ini yaitu dengan menerbitkan laporan keuangan pemerintah daerah. Transparansi adalah suatu keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, oleh karena itu transparansi merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam proses penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah. Akuntabilitas dan transparansi termasuk ke dalam prinsip *Good Government Governance* (GGG) yang menjadi acuan tata kelola pemerintahan termasuk dalam membuat LKPD. Aswadi (2014) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sedangkan pemilihan variabel pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dipilih dengan alasan SAP tersebut berisi aturan atau prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sehingga pemahaman pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap SAP merupakan faktor penting baik untuk meningkatkan kualitas atau pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Penelitian terdahulu Wiraputra, dkk (2014) menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemilihan variabel Sistem Pengendalian Internal (SPI) yaitu dengan alasan setiap lembaga pemerintahan harus memiliki sistem pengendalian internal. Dalam hal ini, tujuannya untuk keterandalan pelaporan keuangan sehingga jika suatu organisasi pemerintahan daerah ingin mewujudkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik, maka harus memiliki sistem pengendalian internal yang baik pula. Widari (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti ingin membuat penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah prinsip akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah prinsip transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh prinsip akuntabilitas terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh prinsip transparansi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bidang Teoritis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian lain khususnya untuk penelitian di bidang akuntansi sektor publik.
- b. Sebagai tambahan literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia sehingga dapat memperluas pengetahuan di Indonesia.

2. Bidang Praktik

- a. Untuk kalangan praktisi, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang berguna untuk meningkatkan kualitas dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah.